

Muallem Tegaskan JKA Tidak Dihapus, Hanya Penyesuaian

Category: ACEH

written by Redaksi | April 21, 2026



BANDA ACEH – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa [Muallem](#), memberikan penegasan resmi terkait dinamika program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Dalam pernyataan terbarunya, Muallem meluruskan isu yang berkembang di masyarakat dengan menekankan bahwa pemerintah tidak menghapus program tersebut, melainkan melakukan langkah penyesuaian strategis.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menyelaraskan [JKA](#) dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna menghindari tumpang tindih pembiayaan sekaligus memastikan keberlanjutan anggaran daerah di masa depan.

Bukan Penghapusan, Melainkan Sinkronisasi

[Muallem](#) menegaskan bahwa JKA tetap menjadi simbol perjuangan, keadilan, dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat

Aceh. Nilai dasar dan semangat program ini tidak mengalami perubahan. Namun, pemerintah memandang perlu adanya sinkronisasi sistem.

“Penyesuaian ini dilakukan agar sistem [JKA](#) lebih efektif dan efisien, serta selaras dengan regulasi jaminan kesehatan secara nasional. Tujuannya adalah agar anggaran yang ada dapat dikelola lebih berkelanjutan tanpa mengurangi esensi dari layanan itu sendiri,” ujar Mualem dalam keterangan resminya.

Prioritas bagi Kelompok Rentan

Salah satu poin krusial dalam arahan Gubernur adalah komitmen mutlak terhadap masyarakat miskin dan rentan. Mualem menjamin bahwa akses layanan kesehatan bagi kelompok ini tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah memastikan tidak ada warga Aceh yang kehilangan hak atas layanan kesehatan dasar selama proses penyesuaian ini berlangsung.

Untuk menjamin akurasi distribusi manfaat, pemerintah akan melakukan evaluasi dan validasi data penerima secara terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Langkah ini diambil agar subsidi kesehatan benar-benar tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan.

Komitmen Transparansi dan Dialog

Menanggapi berbagai spekulasi publik, Mualem menyatakan bahwa pemerintah akan tetap transparan terkait realokasi anggaran. Segala perubahan dan penyesuaian yang dilakukan akan dijelaskan secara rinci kepada publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Sebagai bentuk keterbukaan, pemerintah juga membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, lembaga legislatif, hingga tokoh masyarakat.

Gubernur Aceh menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh

lapisan masyarakat untuk menjaga suasana yang kondusif. “Mari kita utamakan kebersamaan. Pemerintah berkomitmen mencari solusi paling bijak demi kesejahteraan dan kesehatan seluruh rakyat Aceh,” pungkasnya.[]